Jurnal Ruang Sosialia
Volume 01, Number 01, 2025 pp. 819-826
Open Access:

Peran Inovasi Sosial dan Kebijakan Publik dalam Mengurangi Kesenjangan Digital: Studi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Bontomarannu

Nayla Saputri Jayanti[1*]

[1]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember 19, 2025
Revised Desember 19, 2025
Accepted Desember 22, 2025
Available online Desember 23, 2025

Kata Kunci:
Kesenjangan Digital; Keadilan Sosial.

Keywords:
Digital Devide; Social Justice

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Al Ghani Cendekia.

ABSTRAK

Kesenjangan digital merupakan tantangan signifikan yang mempengaruhi keadilan sosial di era informasi saat ini. Jurnal ini membahas peran inovasi sosial dalam pengembangan kebijakan publik yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan digital dan mendorong keadilan sosial. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menganalisis berbagai studi kasus kebijakan yang berhasil diimplementasikan di berbagai negara, termasuk program-program yang memfasilitasi akses teknologi bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa inovasi sosial, seperti inisiatif berbasis komunitas dan kemitraan antara sektor publik dan swasta, dapat meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta memperkuat literasi digital. Selain itu, kebijakan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat berpotensi mengurangi kesenjangan digital dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan sosial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi inovasi sosial dalam kerangka kebijakan publik untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keadilan sosial dan akses yang merata terhadap teknologi. Dengan demikian, inovasi sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan akses, tetapi juga sebagai pendorong perubahan sosial yang lebih luas

ABSTRACT

The digital divide is a significant challenge affecting social justice in today's information age. This journal discusses the role of social innovation in the development of public policy aimed at overcoming the digital divide and promoting social justice. This research adopts a qualitative approach by analyzing various case studies of policies that have been successfully implemented in various countries, including programs that facilitate access to technology for marginalized community groups. The results of the analysis show that social innovation, such as community-based initiatives and partnerships between the public and private sectors, can increase access to information and communications technology (ICT), as well as strengthen digital literacy. In addition, public policies that are inclusive and responsive to community needs have the potential to reduce the digital divide and encourage active participation in social development. This research recommends the need to integrate social innovation in the public policy framework to create an ecosystem that supports social justice and equitable access to technology. In this way, social innovation not only functions as a tool to increase access, but also as a driver of broader social change.

*Corresponding author
E-mail addresses: naylasaputrijayanti@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kesenjangan digital telah menjadi tantangan serius di era teknologi informasi saat ini, di mana akses terhadap teknologi dan internet tidak merata di berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya membatasi kesempatan individu untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, tetapi juga menghambat upaya menciptakan keadilan sosial. Inovasi sosial dan kebijakan publik memainkan peran penting dalam mengatasi masalah ini dengan mengembangkan solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Di Indonesia, meskipun ada kemajuan dalam infrastruktur telekomunikasi, banyak daerah masih mengalami keterbatasan akses internet yang memadai.

Kesenjangan digital menjadi isu krusial yang menghambat pencapaian keadilan sosial di era modern. Akses yang tidak merata terhadap teknologi informasi dan komunikasi menciptakan disparitas signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan dan ekonomi hingga partisipasi politik dan akses layanan publik. Kondisi ini mendesak perlunya inovasi sosial dan kebijakan publik yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan bahwa teknologi digital dimanfaatkan secara adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Inovasi sosial berperan penting dalam menjembatani kesenjangan digital dengan menawarkan solusi-solusi kreatif dan berkelanjutan. Berbagai pendekatan inovatif, seperti pengembangan aplikasi mobile yang ramah pengguna, pelatihan digital bagi masyarakat kurang mampu, dan pemanfaatan teknologi tepat guna di daerah terpencil, telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan akses dan literasi digital. Namun, keberhasilan inovasi sosial ini sangat bergantung pada dukungan kebijakan publik yang terarah dan komprehensif.

Perkembangan pesat teknologi digital telah menciptakan peluang luar biasa bagi kemajuan sosial dan ekonomi, namun di sisi lain juga memperlebar jurang kesenjangan digital. Akses yang tidak merata terhadap teknologi dan literasi digital menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan, mengancam prinsip keadilan sosial dan menghambat partisipasi penuh masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan inovatif untuk mengatasi tantangan ini.

Jurnal ini berfokus pada peran inovasi sosial dan kebijakan publik dalam mengatasi kesenjangan digital dan mewujudkan keadilan sosial. Inovasi sosial menawarkan solusi-solusi kreatif dan adaptif untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan teknologi di berbagai konteks sosial dan ekonomi. Sementara itu, kebijakan publik berperan krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, memastikan akses yang adil, dan mendorong pemanfaatan teknologi untuk kepentingan masyarakat luas.

Dengan menganalisis berbagai program dan inisiatif yang telah diimplementasikan, jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan dan hambatan dalam upaya penanggulangan kesenjangan digital. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil di era digital, dimana teknologi menjadi pendorong utama kemajuan dan kesejahteraan bagi semua.

Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa kesenjangan digital dipengaruhi tidak hanya oleh ketersediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga oleh variabel sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Fachrusi (2023) menekankan bahwa kesenjangan digital merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat, terutama dalam hal akses pendidikan, ekonomi, dan layanan publik. Ini sejalan dengan pandangan Rasya dan Triadi (2024), yang menyebutkan bahwa akses terhadap teknologi digital sekarang menjadi bagian dari keadilan itu sendiri.

Dari sudut pandang kesejahteraan sosial, kesenjangan digital dapat dianalisis melalui teori keadilan sosial, terutama konsep keadilan distributif yang menitikberatkan pada pemerataan akses terhadap sumber daya publik. John Rawls berpendapat bahwa keadilan sosial harus memastikan kelompok yang paling tidak beruntung menerima manfaat maksimal dari kebijakan publik. Dalam konteks digitalisasi, prinsip ini mengharuskan negara untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat di daerah pedesaan, dan kelompok rentan tidak tertinggal dalam perubahan digital.

Di sisi lain, teori inovasi sosial menjelaskan bahwa solusi untuk permasalahan sosial tidak selalu bergantung pada pemerintah, tetapi juga dapat muncul dari inisiatif masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Inovasi sosial diartikan sebagai praktik baru yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan sosial (Anggraini et al. , 2024). Dengan demikian, inovasi sosial dan kebijakan publik merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam upaya mengurangi kesenjangan digital serta mewujudkan keadilan sosial. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan kerangka teoretis tersebut, studi ini menganggap inovasi sosial sebagai alat strategis dalam kebijakan publik untuk mengatasi kesenjangan digital, terutama dalam konteks kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus untuk mengkaji peran inovasi sosial dan kebijakan publik dalam menangani kesenjangan digital. Fokus dari penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan serta program inovasi sosial yang berbasis digital untuk masyarakat guna meningkatkan akses dan pemahaman terhadap teknologi informasi.

Kegiatan penelitian dilakukan di Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjadi wilayah yang mencerminkan daerah sekitar kota dengan akses digital yang belum merata. Lokasi ini dipilih karena adanya inisiatif dari pemerintah daerah dan komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman digital masyarakat melalui pelatihan teknologi dan penyediaan akses internet. Partisipan penelitian dipilih dengan cara purposive, terdiri dari: Pejabat pemerintah desa dan kecamatan, Pengelola program atau relawan dalam bidang literasi digital, Tokoh masyarakat, Anggota masyarakat yang menggunakan layanan digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi di lapangan, serta kajian terhadap dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis tematik yang mencakup tahap reduksi data, presentasi data, dan pembuatan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini mengandalkan triangulasi sumber serta teknik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan digital di Kecamatan Bontomarannu masih dirasakan oleh sebagian masyarakat, terutama kelompok usia lanjut dan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Meskipun ketersediaan jaringan internet relatif memadai, pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan literasi digital dan kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu narasumber dari pihak pemerintah desa menyatakan bahwa adanya infrastruktur digital tidak sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkannya secara efektif. Penggunaan teknologi masih lebih banyak untuk kebutuhan hiburan, sedangkan penggunaannya untuk administrasi layanan publik dan aktivitas ekonomi masih sangat terbatas.

Pandangan yang sama diungkapkan oleh masyarakat yang mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman tentang penggunaan layanan digital sering kali mengakibatkan ketergantungan pada orang lain untuk mengakses layanan administrasi yang berbasis online. Situasi ini menunjukkan bahwa akses terhadap teknologi tanpa bimbingan yang cukup belum bisa meningkatkan kemandirian masyarakat.

Sebagai jawaban atas isu tersebut, pemerintah desa berkolaborasi dengan pemuda setempat dan sukarelawan mengadakan pelatihan dasar literasi digital, seperti cara menggunakan aplikasi untuk layanan publik dan pemasaran digital bagi pengusaha mikro. Program ini dianggap memberikan keuntungan awal bagi komunitas, meskipun jangkauannya masih terbatas. Temuan penelitian ini menguatkan hasil kajian Fachrusi (2023) yang menyatakan bahwa kesenjangan digital tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mencerminkan ketimpangan sosial dan struktural. Rendahnya literasi digital masyarakat menunjukkan adanya ketidakmerataan distribusi pengetahuan dan kapasitas sosial, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

Dari perspektif keadilan distributif, kebijakan publik seharusnya memberikan perhatian lebih besar kepada kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak kesenjangan digital. Program pelatihan literasi digital berbasis komunitas yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan bentuk inovasi sosial yang relevan, sebagaimana dikemukakan oleh Anggraini et al. (2024), bahwa inovasi sosial dapat menjadi solusi alternatif ketika kebijakan formal belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Rasya dan Triadi (2024) yang menekankan bahwa kemampuan untuk mengakses teknologi digital adalah bagian dari hak fundamental bagi setiap warga negara. Dengan demikian, kolaborasi antara inovasi sosial dan kebijakan publik berpotensi besar untuk mempercepat terwujudnya keadilan sosial dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan layanan publik.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan teknologi secara fisik tidak langsung berhubungan dengan peningkatan kemampuan sosial masyarakat. Penggunaan internet lebih dominan untuk hiburan daripada untuk mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan akses layanan publik. Situasi ini mencerminkan adanya perbedaan antara tersedianya teknologi dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara efektif. Masyarakat masih menghadapi tantangan dalam mengakses layanan administrasi yang berbasis digital karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknologi. Ketergantungan pada bantuan dari pihak lain menunjukkan bahwa proses transformasi digital belum sepenuhnya menyeluruh dan masih ada kelompok masyarakat yang tertinggal.

Menanggapi situasi ini, pemerintah desa bekerja sama dengan komunitas pemuda dan relawan setempat memulai sebuah program pelatihan literasi digital yang sederhana, seperti pengenalan aplikasi untuk layanan publik dan pemasaran digital untuk pelaku UMKM. Meskipun program ini memberikan dampak positif di awal, jangkauannya masih terbatas dan belum dapat mencakup seluruh kalangan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini secara empiris menegaskan berbagai studi yang menunjukkan bahwa kesenjangan digital adalah masalah yang memiliki banyak dimensi dan bersifat struktural. Fachrusi (2023) menjelaskan bahwa kesenjangan digital tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis atau infrastruktur, tetapi juga mencerminkan ketimpangan sosial dalam distribusi pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan. Kondisi rendahnya literasi digital masyarakat Bontomarannu menunjukkan adanya ketidakmerataan kapasitas sosial yang berpotensi memperlebar kesenjangan kesejahteraan.

Dalam sudut pandang kesejahteraan sosial, keadaan ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, terutama yang berkaitan dengan keadilan distribusi. Prinsip keadilan distribusi menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk membagikan sumber daya publik secara merata, khususnya kepada kelompok masyarakat yang paling rentan. Rawls menekankan bahwa kebijakan publik seharusnya lebih menguntungkan bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Dalam hal ini, rendahnya tingkat literasi digital di masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi belum sepenuhnya mendukung kelompok yang rentan.

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan pendapat Rasya dan Triadi (2024) yang mengindikasikan bahwa akses terhadap teknologi digital merupakan hak dasar setiap warga negara. Jika masyarakat tidak dapat memanfaatkan teknologi digital dengan mandiri, maka hak tersebut belum sepenuhnya tercapai. Ini menunjukkan bahwa keadilan digital tidak hanya dapat terwujud melalui penyediaan infrastruktur saja, melainkan juga memerlukan intervensi kebijakan yang fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat.

Dalam hal ini, adanya program pelatihan literasi digital yang berbasis komunitas bisa dianggap sebagai inovasi sosial. Anggraini et al. (2024) menjelaskan bahwa inovasi sosial muncul sebagai respons terhadap batasan kebijakan formal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Inovasi sosial yang melibatkan komunitas lokal dipandang lebih fleksibel karena dapat menyesuaikan program dengan kondisi sosial dan budaya yang ada di masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah desa dan komunitas lokal mempunyai potensi besar untuk menjembatani kesenjangan digital. Namun, efektivitas inovasi sosial ini tetap bergantung pada dukungan berkelanjutan dari kebijakan publik.

Tanpa adanya dukungan struktural dari pemerintah, inovasi sosial bisa berpotensi menjadi solusi sementara yang tidak mampu menangani akarnya permasalahan kesenjangan digital secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen dalam literatur bahwa pengurangan kesenjangan digital memerlukan pendekatan yang holistik antara kebijakan publik yang adil dan inovasi sosial yang berbasis masyarakat. Penyatuan keduanya merupakan syarat penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era digital.

3.1 Kesenjangan Digital dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan akses digital di tingkat lokal mencerminkan masalah kesejahteraan sosial yang lebih luas. Kesenjangan dalam kemampuan digital dan penggunaan teknologi menunjukkan adanya ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya sosial yang seharusnya tersedia untuk publik. Dalam studi mengenai kesejahteraan sosial, situasi ini dipahami sebagai bentuk pengucilan sosial, yaitu ketika individu atau kelompok tertentu merasa terhalang untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik akibat keterbatasan dalam akses dan kemampuan (Fachrusi, 2023).

Literatur dalam bidang kesejahteraan sosial menekankan bahwa perubahan digital dapat membuka lebih banyak peluang sosial asalkan didukung oleh kebijakan yang bersifat inklusif. Namun, tanpa adanya langkah-langkah yang tepat, digitalisasi malah bisa memperburuk ketidaksetaraan yang ada. Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hal tersebut, di mana masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam pendidikan dan ekonomi biasanya kurang mampu dalam memanfaatkan teknologi digital, meskipun infrastruktur sudah ada. Keadaan ini memperkuat pendapat bahwa perbedaan digital merupakan cerminan dari ketidakadilan struktural yang belum sepenuhnya diatasi melalui kebijakan publik.

ketidakadilan sosial yang timbul karena adanya kesenjangan dalam akses teknologi menunjukkan bahwa kemampuan untuk menggunakan informasi digital kini telah menjadi suatu dimensi baru dalam ketidaksetaraan sosial. Dalam pandangan kesejahteraan sosial masa kini, teknologi digital tidak lagi dilihat sebagai sekadar alat, tetapi telah menjadi syarat utama bagi partisipasi dalam sosial dan ekonomi. Ketika ada kelompok tertentu dalam masyarakat yang tidak mampu mengakses dan memanfaatkan teknologi digital dengan baik, mereka berisiko terpinggirkan secara ganda, baik pada aspek ekonomi maupun sosial. Literatur dalam bidang kesejahteraan sosial menekankan bahwa situasi ini dapat melemahkan perjalanan sosial dan memperpanjang ketidaksetaraan antar kelompok masyarakat.

3.2 Inovasi Sosial sebagai Mekanisme Intervensi Kebijakan

Hasil riset menunjukkan bahwa inovasi sosial yang didasarkan oleh komunitas berperan penting dalam menghubungkan antara kebijakan publik dan kebutuhan nyata masyarakat. Inisiatif literasi digital yang dipelopori oleh pemuda dan relawan lokal membuktikan bahwa metode partisipatif lebih efektif dalam menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani. Penemuan ini sejalan dengan pendapat Anggraini et al. (2024) yang menyatakan bahwa inovasi sosial memiliki sifat yang adaptif dan kontekstual, sehingga lebih peka terhadap perubahan sosial di tingkat lokal.

Dalam konteks kebijakan publik, inovasi sosial tidak bisa dianggap sebagai pengganti peran pemerintah, melainkan sebagai pendukung. Literatur mengenai kebijakan sosial menekankan bahwa pemerintah tetap memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan pemerataan akses dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, inovasi sosial yang ditemukan dalam penelitian ini hendaknya dipahami sebagai komponen dari ekosistem kebijakan yang lebih besar, di mana sinergi antara pemerintah dan masyarakat adalah prasyarat penting untuk mencapai keadilan sosial di era digital.

Keberhasilan inovasi sosial yang berbasis komunitas dalam studi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan partisipasi mampu mengatasi keterbatasan dari kebijakan yang diterapkan secara satu arah. Literatur mengenai kesejahteraan sosial menegaskan bahwa

kebijakan publik yang ditetapkan secara terpusat sering kurang memperhatikan kebutuhan khusus dari masyarakat lokal. Dalam hal ini, keterlibatan pemuda dan relawan di lingkungan setempat memungkinkan terjadinya proses pembelajaran sosial yang bersifat timbal balik, di mana program literasi digital tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membangun rasa saling percaya, solidaritas, serta kemampuan kolektif masyarakat. Dengan cara ini, inovasi sosial berperan sebagai alat yang memperkuat solidaritas sosial dan mendukung pencapaian tujuan keadilan sosial.

3.3 Relevansi Temuan dengan Teori Keadilan Distributif

Dari perspektif teori distribusi keadilan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian manfaat digital belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial. Rawls menegaskan bahwa kebijakan publik seharusnya dirancang untuk memberikan keuntungan terbesar kepada kelompok yang paling tidak beruntung. Namun, dalam kenyataannya, kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam literasi digital justru merupakan pihak yang paling sulit untuk mendapatkan akses terhadap manfaat transformasi digital.

Situasi ini mencerminkan adanya jurang antara sasaran normatif kebijakan digital dan pelaksanaannya di lapangan. Literatur mengenai keadilan sosial dalam konteks kebijakan publik menyoroti pentingnya pendekatan afirmatif, yaitu kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk memperkuat kapasitas kelompok yang rentan. Program literasi digital berbasis komunitas dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai langkah awal dari pendekatan afirmatif, meskipun masih membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih sistematik dan berkelanjutan.

Dalam konteks teori keadilan distribusi, ketidakmerataan dalam penggunaan teknologi digital yang terungkap dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran negara dalam memberikan manfaat pembangunan secara adil masih belum maksimal. Akses terhadap teknologi digital menjadi sumber daya penting dalam masyarakat dan ekonomi saat ini, sehingga ketidakmampuan kelompok tertentu untuk memanfaatkannya dapat semakin memperburuk ketidaksetaraan sosial yang sudah ada. Teks dalam literatur kesejahteraan sosial menekankan bahwa keadilan distribusi tidak hanya diukur berdasarkan distribusi sarana, tetapi juga dari seberapa merata kemampuan dalam menggunakan sarana tersebut dengan efektif.

Kehadiran program literasi digital berbasis komunitas yang terdapat dalam penelitian ini memperlihatkan adanya usaha awal untuk mengatasi perbedaan antara kebijakan normatif dan kenyataan di lapangan. Namun, penelitian-penelitian tentang kebijakan publik menunjukkan bahwa intervensi afirmatif yang bersifat sementara dan tidak terintegrasi berisiko menciptakan dampak yang terbatas. Agar sejalan dengan prinsip keadilan distribusi, program seperti ini hendaknya dimasukkan dalam kebijakan publik yang menyeluruh, yang didukung oleh peraturan yang jelas, alokasi anggaran yang berkelanjutan, serta sistem evaluasi yang teratur. Dengan demikian, kebijakan digital tidak hanya berfungsi sebagai alat modernisasi administrasi, tetapi juga sebagai cara untuk redistribusi sosial yang berfokus pada pengurangan ketidaksetaraan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.4 Implikasi Sosial dan Kebijakan dalam Kerangka Studi Literatur

Secara teori, hasil penelitian ini mendukung literatur yang menyatakan bahwa keadilan sosial di zaman digital sangat tergantung pada keterlibatan aktif negara dan masyarakat. Rasya dan Triadi (2024) menegaskan bahwa hak akses terhadap teknologi digital merupakan hak asasi warga negara yang wajib dilindungi melalui kebijakan publik. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemenuhan hak tersebut tidak hanya tergantung pada adanya infrastruktur, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi secara mandiri.

Dari segi kebijakan, temuan ini menunjukkan perlunya penggabungan antara kebijakan digital tingkat nasional dan inisiatif berbasis komunitas di tingkat lokal. Literatur terkait kebijakan sosial mencatat bahwa keberhasilan program kesejahteraan sangat bergantung pada kesesuaian kebijakan dengan realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan untuk

mengurangi kesenjangan digital perlu dikembangkan secara inklusif, dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan hanya sebagai objek dari kebijakan tersebut.

Selain itu, peran pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial di zaman digital tidak bisa dipandang hanya pada fungsi penyediaan infrastruktur teknologi. Pemerintah memiliki tanggung jawab normative dan institusional untuk merumuskan serta menjalankan kebijakan publik yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengurangan ketidaksetaraan struktural. Literatur tentang kesejahteraan sosial menegaskan bahwa kebijakan yang adil harus bersifat afirmatif, terutama bagi kelompok masyarakat yang berada dalam posisi kurang diuntungkan.

Dalam konteks kesenjangan digital, pendekatan afirmatif ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kemampuan literasi digital, pendampingan yang berkelanjutan, serta integrasi kebijakan digital dengan sektor pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, pemerintah berfungsi sebagai aktor strategis yang memastikan bahwa proses transformasi digital tidak memperburuk ketidaksetaraan sosial, tetapi justru berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan.

Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan digital. Berbagai penelitian mengenai inovasi sosial menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program kebijakan dapat meningkatkan relevansi, penerimaan, dan keberlanjutan intervensi sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat memperkuat kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara produktif.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Studi ini mengindikasikan bahwa kesenjangan akses teknologi di Kecamatan Bontomarannu masih menjadi masalah dalam hal kesejahteraan sosial, terutama bagi lansia serta individu dengan pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah. Meskipun jaringan internet ada, penggunaannya belum maksimal karena rendahnya pengetahuan digital dan keterbatasan pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan digital bukan hanya soal teknis, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan sosial dan struktural. Dari sudut pandang keadilan distribusi, kebijakan digitalisasi belum sepenuhnya memberikan manfaat secara adil kepada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan. Inovasi sosial yang berbasis komunitas, seperti program literasi digital yang melibatkan generasi muda dan relawan setempat, menunjukkan peran penting dalam mengurangi kesenjangan tersebut. Namun, efektivitas dari inovasi sosial ini masih memerlukan dukungan kebijakan publik yang berkelanjutan dan terpadu.

Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat kebijakan yang berfokus pada literasi digital yang berkelanjutan bagi kelompok yang rentan, bukan hanya menekankan pada pembangunan infrastruktur. Selain itu, inovasi sosial berbasis komunitas harus diintegrasikan secara sistematis dalam kebijakan publik lewat dukungan regulasi, dana, dan pendampingan. Penelitian mendatang diharapkan bisa memperluas area studi dan memakai berbagai pendekatan metodologis untuk memperdalam pemahaman mengenai kesenjangan digital serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh dukungan, bantuan, dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Penghargaan ditujukan kepada para akademisi, peneliti, dan lembaga ilmiah atas kontribusi yang memperkaya pemahaman penulis. Terima kasih juga kepada institusi yang telah menyediakan fasilitas dan lingkungan akademik yang mendukung.

Ucapan apresiasi penulis sampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan masukan yang sangat konstruktif. Penulis juga berterima kasih kepada rekan-rekan sejawat atas diskusi dan dukungan moral yang berarti. Semoga seluruh bentuk kebaikan dan kontribusi tersebut menjadi amal berharga serta membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Sudrajat, J. A., Ramadhani, K., Riyano, K. R. P., & Antoni, H. (2024). PERAN PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI ERA DIGITAL. Sindoro: Cendikia Pendidikan, 10(3), 1-10.

Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 12-12.

Anggraini, D. M., Tantriasari, R., Rudianto, R., Oktavian, Z. N., & Amir, D. R. (2024, July). IMPLEMENTASI KEADILAN SOSIAL: DALAM UPAYA MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG SEJAHTERA. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FPMIPA (Vol. 2, No. 1, pp. 572-585).

Harahap, A. S. (2023). ANALISIS KRITIS TERHADAP MODEL PEMBANGUNAN BERBASIS KEADILAN SOSIAL. Literacy notes, 1(2).

Fachrusi, M. (2023). KESENJANGAN DIGITAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL: SUATU ANALISIS SOSIO-POLITIK. literacy notes, 1(2).

Sundari. (2023). Dampak kebijakan publik terhadap ketimpangan sosial di era digital. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 7(3), 233–247.

Haryanti, S., & Rusfian, E. Z. (2022). Government public relations and social media: Bridging the digital divide on people with social welfare problems. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 26(2), 145–160.

Hadi, A. (2022). Bridging Indonesia's digital divide: Rural–urban perspectives. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 26(1), 63–78.

Awaluddin, R., Safarudin, R., & Ihsan, S. (2023). Rethinking digital equity: A narrative review of public service digitalization. Jurnal Sains MIPA Indonesia, 5(2), 112–125.

Arastha, A., Almadinah, B., Ferrysca, N. A., & Nurdin, N. (2025). Mengatasi kesenjangan digital: Mewujudkan inklusi dan partisipasi masyarakat Indonesia melalui e-government. Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 17(1).

Shahrash, I., Mirajiah, R., & Widyanto, N. (2022). Digital inclusion strategies to enhance accessibility of public services in Indonesia. Jurnal Aktor, 2(1), 1–15.

Pohan, K. N. K., Aufia, K., Azzahra, B. I., & Firman. (2025). Analisis kesenjangan literasi digital masyarakat dalam mengakses dan memahami kampanye politik daring. Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik, 2(2).

Institute, C. (2025). Kesenjangan literasi digital dan dampaknya terhadap perilaku ekonomi UMKM: Pendekatan teori inovasi digital. Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, 24(12), 1751–1760.

Efendi, M. S. A., Agustin, S., Christo, J. O., & Akrom, M. (2025). Literasi digital: Kunci bertahan di era digital. Sindoro: Cendikia Pendidikan.